



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 06 Maret 2020

Nomor : 115/BP/HM.01.1/3/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permintaan *update* Pengisian LKE dan *upload* data dukung LKE

Yth.

1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;

di -

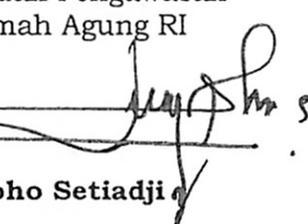
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 316/SEK/OT.01.1/2/2020 tanggal 17 Februari 2020 Hal Permintaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Terhadap Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 114 (seratus empat belas) unit kerja yang belum lolos memperoleh predikat WBK tahun 2019. Terhadap unit kerja tersebut dilakukan *desk evaluation* secara bertahap;
2. Guna mengaktifkan kegiatan *desk evaluation* tersebut, diharapkan kepada 114 unit kerja tersebut segera menyiapkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) berupa:
 - a. Laporan Hasil PMPZI;
 - b. Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
 - c. Data Dukung yang relevan dan terkini (*update*);
3. Seluruh dokumen tersebut segera disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui <https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/pmpzi> paling lambat 31 Maret 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI


Nugroho Setiadji

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Para Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.